HADIRI FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) BMKG STAKLIM KALBAR, OMBUDSMAN KALBAR DORONG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Jum'at, 13 November 2026 - kalbar

PONTIANAK - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Althara Cafe Kubu Raya pada Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Barat, dihadiri oleh *stake holder* terkait dari unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Media dan organisasi masyarakat.

Dalam sesi diskusi, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat, Marini, mengapresiasi langkah Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Barat atas Forum Konsultasi Publik. Kegiatan ini selaras dengan prinsip partisipatif dalam pembuatan standar pelayanan.

"Terkait komponen standar pelayanan publik, yang menjadi acuan tentunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terutama dalam Pasal 21 yang mengatur 14 komponen pelayanan publik yang harus diperhatikan," tegas Marini.

Marini juga menyarankan agar ketiga jenis layanan yang menjadi kewenangan Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Barat diselaraskan dengan ketentuan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, guna mendorong peningkatan kualitas layanan. Ia juga menekankan pentingnya standar pelayanan untuk dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dalam penyelenggaran layanan publik.

Lebih lanjut Marini menyampaikan bahwa melalui Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Barat dapat menjadikan seluruh masukan yang disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap pelayanan publik di BMKG semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam sambutannya, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Barat, Bernadus Daniel, menyampaikan bahwa FKP merupakan sarana strategis untuk membangun komunikasi dua arah antara penyelenggara pelayanan publik, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. "Melalui forum ini, kita dapat bertukar pandangan, menyampaikan aspirasi, serta memperoleh masukan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan layanan. Forum ini juga merupakan wujud komitmen terhadap pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (ORI-KALBAR)